|  |  |
| --- | --- |
|  | LAMPIRAN  PERATURAN BUPATI MALANG  NOMOR TAHUN 2019  TENTANG  RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2020 |

**RENCANA KERJA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.Sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah mempunyai arti penting dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintahan Daerah mengingat Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Disamping itu Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.

Mengingat pentingnya dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah(Renja-PD) harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Tara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk jangka waktu satu tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan bersifat indikatif.

Proses penyusunan Rancangan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 diawali dari Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang tanggal 16 Nopember 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 Hal Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020. Serta surat Edaran Bupati Malang, tanggal 8 Februari 2019, Nomor: 050/1466/35.05.202/2019, Hal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2020. Selanjutnya dilaksanakan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Selanjutnya melaksanakan analisis gambaran pelayanan, mereviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2020 dan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021. Tema Pembangunan Tahun 2020 adalah “**Memantapkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Didukung Peningkatan Profesionalisme Aparatur , Potensi Pariwisata dan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan**”. Kaitan tema tersebut dengan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah 2016-2021, Badan Pendapatan Daerah berperandalam mendukung Misi ke-4 Bupati Malang yaitu Mengembangkanekonomi masyarakat berbasis pertanian,pariwisata, dan industri kreatif.Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Malang dalam terus menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan pengembangan ekonomi dilingkungan masyarakat. Penyampaian Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang akan datang, bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju tahun 2021, dan kesesuaian dengan dokumen perencanaan yaitu: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Malang Tahun 2016–2021, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2020.Rencana Kerja juga harus mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Di tingkat Dinas/Badan, Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2020 akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

* 1. **Landasan Hukum**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);
26. Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/986/KEP/35.07.205/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.205/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/119/KEP/35.07.205/2019 tentang Tim Penyusun Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten MalangTahun 2020 adalah :

* 1. Mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai target pencapaian dalam tahun anggaran 2020;
  2. Memberikan pedoman yang dapat mengarahkan seluruh potensi dalam rangka mewujudkan keterpaduan program dan kegiatandi tahun 2020;dan
  3. Memberikan umpan balik sebuah proses perencanaan dalam rangka perencanaan tahun 2020.

Sedangkan tujuannya adalah Mewujudkan efisiensi dan efektifitas terhadap alokasi sumber daya dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah ditahun 2020 sesuai target sasaran strategis yang telah ditetapkan;

* 1. **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang
  2. Landasan Hukum
  3. Maksud dan Tujuan
  4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

* 1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah
  2. Analisis Kinerja Badan PendapatanDaerah
  3. Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah
  4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
  5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

* 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
  2. Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah
  3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V PENUTUP

**BAB II**

**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah**

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun lalu. Pada dasarnya Tahun 2018 merupakan tahun yang bisa dikatakan sangat mendukung terlaksanakanya program serta kegiatan secara baik dan terstruktur. Pada Tahun 2018 ini beberapa inovasi terkait aplikasi Pembayaran Pajak Daerah mulai di kembangkan serta dilakukan sosialisasi dan uji coba langsung terhadap masyarakat. Salah satu contoh aplikasi yang mulai di kembangkan pada tahun 2018 ini adalah aplikasi SIPANJI ( Sistem Penerimaan Pajak Mandiri) yang di rintis oleh Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( PDRD), aplikasi ini meliputi aplikasi Pembayarandan Pendaftaran Pajak Daerah secara online. Namun tentunya dalam pelaksanaan aplikasi ini masih diperlukan banyak evaluasi.

Sebelum dilaksanakan evaluasi, dilakukan pengukuran kinerja kemudian dilanjutkan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.Analisis ataskendala atau permasalahan yang terjadi untuk dicarikan solusi dan pemecahannya sehingga tujuan dan target kegiatan dapat tercapai secara optimal sesuai dengan yang ditetapkan.Faktor-faktor penyebab terpenuhi dan tidak terpenuhi target kinerja program atau kegiatan, implikasi yang timbul terhadap target capaian dan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor–faktor penyebab, merupakan penjelasan dari capaian kinerja pada **tabel 2.1** berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.1**  **Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2019** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kode** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)** | **Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021** | **Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017** | **Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu** | | | | **Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2019)** | **Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019** | |
| **Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018** | **Realisasi Kinerja Pada Triwulan** | **Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018** | **Tingkat Realisasi (%)** | **Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2019** | **Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 4 | 2 | 1 |  | **I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran** | **100%** | **20%** | **20%** |  | **19.97%** | **99,88%** | **20%** | **59.97** | **59.97** |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar | 55000 buah | 15000 buah | 16000 buah | 1600 buah | 16000 buah | 100 | 12000 buah | 43000 buah | 78.18 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet | 60 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 3 bulan | 12 bulan | 100 | 12 bulan | 36 bulan | 60.00 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan | 500 jenis | 85 jenis | 83 jenis | 25 jenis | 83 jenis | 100 | 57 jenis | 225 jenis | 45.00 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan | 21100 HOK | 4000 HOK | 7780 HOK | 300 HOK | 7780 HOK | 100 | 7780 HOK | 19560 HOK | 92.70 |
| 4 | 2 | 1 | 6 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan | 14800 OB | 230 OB | 3700 OB | 230 OB | 3700 OB | 100 | 3700 OB | 7630 OB | 51.55 |
| 4 | 2 | 1 | 7 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah | 2400 HOK | 150 HOK | 790 HOK | 25 HOK | 780 HOK | 98.73 | 790 HOK | 1730 HOK | 72.08 |
| 4 | 2 | 1 | 8 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | 250 jenis | 40 jenis | 11 jenis | 24 jenis | 11 jenis | 100 | 11 jenis | 62 jenis | 24.80 |
| 4 | 2 | 1 | 9 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | 575 jenis | 115 jenis | 73 jenis | 50 jenis | 73 jenis | 100 | 58 jenis | 246 jenis | 42.78 |
| 4 | 2 | 1 | 10 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah | 520 HOK | 100 HOK | 238 HOK | 0 HOK | 238 HOK | 100 | 238 HOK | 576 HOK | 110.77 |
| 4 | 2 | 1 | 11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik | 150 jenis | 15 jenis | 67 jenis | 15 jenis | 67 jenis | 100 | 30 jenis | 112 jenis | 74.67 |
| 4 | 2 | 1 | 12 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | 75 jenis | 10 jenis | 2 jenis | 1 jenis | 2 jenis | 100 | 2 jenis | 14 jenis | 18.67 |
| 4 | 2 | 2 |  | **II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur** | **100%** | **20%** | **20%** |  | **20%** | **100** | **20%** | **60%** | **60.00** |
| 4 | 2 | 2 | 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | 70 bangunan | 10 bangunan | 14 bangunan | 3 bangunan | 14 bangunan | 100 | 14 jenis | 38 bangunan | 54.29 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala | 320 unit | 64 unit | 173 unit | 20 unit | 173 unit | 100 | 64 jenis | 301 jenis | 94.06 |
| 4 | 2 | 2 | 3 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | 560 jenis | 112 jenis | 47 jenis | 14 jenis | 47 jenis | 100 | 47 jenis | 206 jenis | 36.79 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala | 100 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 0 jenis | 20 jenis | 100 | 20 jenis | 60 jenis | 60.00 |
| 4 | 2 | 2 | 5 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | 100 jenis | 20 jenis | 14 jenis | 0 jenis | 14 jenis | 100 | 20 jenis | 54 jenis | 54.00 |
| 4 | 2 | 2 | 6 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 2 yang diadakan | 57 unit | 12 unit | 40 unit | 0 unit | 40 unit | 100 | 4 unit | 56 unit | 98.25 |
|  |  |  |  |  | Jumlah kendaraan dinas/operasional roda 4 yang diadakan | 10 unit | 0 | 7 unit |  | 7 unit | 100 | 1 unit | 8 unit | 80.00 |
| 4 | 2 | 2 | 7 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan | 190 jenis | 24 jenis | 22 jenis | 0 jenis | 22 jenis | 100 | 50 jenis | 96 jenis | 50.53 |
| 4 | 2 | 3 |  | **III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase Penunjang Kerja Aparatur** | **100%** | **20%** | **20%** |  | **20%** | **100** | **20%** | **60%** | **60** |
| 4 | 2 | 3 | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | 1340 stel | 0 stel | 525 stel | 0 stel | 525 stel | 100,00 | 340 stell | 865 stell | 65 |
| 4 | 2 | 3 | 2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga | 1670 stel | 330 stel | 800 stel | 0 stel | 800 stel | 100 | 340 stell | 1470 stell | 88 |
| 4 | 2 | 4 |  | **IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah** | **100%** | **25%** | **20%** |  | **20.2%** | **101** | **25%** | **70.2%** | **70.2** |
| 4 | 2 | 4 | 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan | 400 orang | 5 orang | 200 orang | 0 orang | 202 orang | 101 | 100 orang | 307 orang | 77 |
| 4 | 2 | 5 |  | **V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu** | **100%** | **15%** | **20%** |  | **20%** | **100** | **20%** | **55%** | **55** |
| 4 | 2 | 5 | 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 488 dokumen | 110 buku | 48 dokumen | 0 dokumen | 48 dokumen | 100 | 48 dokumen | 206 buku | 42.21 |
| 4 | 2 | 5 | 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 472 buku | 100 buku | 4 buku | 0 buku | 4 buku | 100 | 4 buku | 108 buku | 22.88 |
| 4 | 2 | 5 | 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 162 buku | 12 buku | 2 buku | 0 buku | 2 buku | 100,00 | 2 buku | 16 buku | 9.88 |
| 4 | 2 | 6 |  | **VI. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD** | **Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti** | **400%** | **0%** | **25%** |  | **33.67%** | **150.67** | **25%** | **58.67%** | **58.67** |
| 4 | 2 | 6 | 1 | Pelayanan dan penelitian BPHTB | Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani | 100% | 0 | 100% | 98 wajib pajak | 176% | 176 | 100% | 276% | 276 |
| 4 | 2 | 6 | 2 | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD | 48 buku | 0 | 12 buku | 22 buku | 12 buku | 100 | 12 buku | 24 buku | 50 |
| 4 | 2 | 6 | 3 | Verifikasi dan Validasi | Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi | 100% | 0 | 100% |  | 176% | 176 | 100% | 276% | 276 |
| 4 | 2 | 7 |  | **VII. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan** | **Tingkat layanan PBB** | **400%** | **0%** | **25%** |  | **25.47%** | **101.87** | **25%** | **50.47%** | **50.47** |
| 4 | 2 | 7 | 1 | Optimalisasi Penerimaan PBB - P2 | Persentase penerimaan PBB - P2 | 400% | 0 | 100% |  | 100% | 100 | 100% | 200% | 50 |
| 4 | 2 | 7 | 2 | Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB - P2 | 5505276 op | 0 | 1376319 OP | 242370 op | 1392226 OP | 101 | 1376319 OP | 2768545 OP | 50 |
| 4 | 2 | 7 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun | 320 desa | 0 | 390 desa | 16 desa | 390 desa | 100 | 390 desa | 390 desa | 122 |
| 4 | 2 | 7 | 4 | Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2 | 4 aplikasi SIM PBB | 0 | 1 aplikasi SIM PBB | 1 aplikasi SIM PBB | 1 aplikasi SIM PBB | 100 | 1 aplikasi SIM PBB | 2 aplikasi SIM PBB | 50 |
| 4 | 2 | 7 | 5 | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2 | Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan | 5505276 op | 0 | 1376319 OP | 344080 OP | 1515390 OP | 110 | 1376319 OP | 2891709 OP | 53 |
| 4 | 2 | 7 | 6 | Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2 | Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 132 desa | 0 | 33 desa | 1 desa | 33 desa | 100 | 33 desa | 66 desa | 50 |
| 4 | 2 | 8 |  | **VIII. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **0%** | **25%** |  | **25%** | **100** | **25%** | **50%** | **50** |
| 4 | 2 | 8 | 1 | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih | 10 sektor pajak | 0 | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 100 | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 100 |
| 4 | 2 | 8 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Jumlah Monitoring Evaluasi Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan | 76 dokumen | 0 | 19 dokumen | 24 dokumen | 19 dokumen | 100 | 18 dokumen | 37 dokumen | 49 |
| 4 | 2 | 8 | 3 | Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat | 120 pembinaan | 0 | 31 pembinaan |  | 31 pembinaan | 100 | 0 | 31 pembinaan | 26 |
| 4 | 2 | 8 | 4 | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 120 WP | 0 | 30 WP | 3 WP | 30 WP | 100 | 30 WP | 60 WP | 50 |
| 4 | 2 | 8 | 5 | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah operasi gabungan yang dilakukan | 16 kegiatan | 0 | 14 kegiatan | 2 kegiatan | 14 kegiatan | 100 | 4 kegiatan | 18 kegiatan | 113 |
| 4 | 2 | 8 | 6 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 16 kegiatan | 0 | 14 kegiatan | 12 kegiatan | 14 kegiatan | 100 | 4 kegiatan | 18 kegiatan | 113 |
| 4 | 2 | 8 | 7 | Rekonsiliasi Piutang Pajak | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT | 48 kegiatan | 0 | 12 kegiatan | 4 kegiatan | 12 kegiatan | 100 | 12 kegiatan | 24 kegiatan | 50 |
| 4 | 2 | 9 |  | **IX. Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB** | **100%** | **0%** | **25%** |  | **25%** | **100** | **25%** | **50%** | **50** |
| 4 | 2 | 9 | 1 | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 19000 SKPD | 0 | 15000 SKPD | 900 SKPD | 15000 SKPD | 100 | 16538 SKPD | 31538 SKPD | 166 |
| 4 | 2 | 9 | 2 | Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | 378 Desa | 0 | 378 desa | 378 desa | 378 desa | 100 | 378 desa | 378 desa | 100 |
| 4 | 2 | 9 | 3 | Penyusunan target dan laporan perpajakan | Jumlah Laporan Realisasi yang disusun | 864 laporan | 0 | 216 laporan | 19 laporan | 216 laporan | 100 | 216 laporan | 432 laporan | 50 |
| 4 | 2 | 9 | 4 | Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda - Benda Berharga | 1293 WP | 0 | 300 WP | 33 wajib pajak | 300 WP | 100 | 331 WP | 631 WP | 49 |
| 4 | 2 | 9 | 5 | Intensifikasi & Ekstenfikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah | jumlah obyek pajak yang di lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi | 118 OP | 0 | 102 OP | 102 op | 102 OP | 100 | 112 OP | 112 OP | 95 |
| 4 | 2 | 9 | 6 | Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 1293 WP | 0 | 300 WP | 24 WP | 300 WP | 100 | 331 WP | 631 WP | 49 |
| 4 | 2 | 9 | 7 | Penyusunan Regulasi Perpajakan | Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang di hasilkan | 12 dokumen | 0 | 3 dokumen | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 | 0 | 3 dokumen | 25 |

Dari Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2019 seperti yang ditampilkan pada tabel 2.1, diketahui bahwa perkiraan realisasi Capaian Target Renstra untuk semua Program Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang realisasi capaian program maupun tingkat capaian realisasi target Renstra Perangkat Daerah sudah terealisasi dengan sesuai dengan target, khususnya untuk Program dan Kegiatan baru yang dilaksanakan mulai tahun 2018, Pada tahun 2017 Badan Pendapatan Daerah adalah Perangkat Daerah baru yang merupakan pecahan dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset sehingga ada perubahan kegiatan serta nomenklatur program/kegiatan yang tidak bisa tercapai dengan maksimal. Setelah dilakukan penyesuaian program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang memiliki 9 Program yaitu 5 program rutin dan 4 program utama Badan Pendapatan, dengan total kegiatan 41 Kegiatan sesuai yang tercantum dalam Reviu Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018.Program/kegiatan pada Badan PendapatanDaerah Kabupaten Malang sampai dengan akhir Tahun2018dengan pencapaian target kinerja sebesar 100 % adalah:

* + - 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 12 kegiatan;
      2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 5 kegiatan;
      3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan;
      4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 kegiatan;
      5. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB, terdiri dari 7 kegiatan;
      6. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah, terdiri dari 6 kegiatan.

Sedangkan Program/kegiatan dengan capaian lebih dari 100 % adalah:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 1 kegiatan, dengan capaian sebesar 105%;
2. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan, terdiri dari 6 kegiatan, dengan capaian sebesar 101,87%; dan
3. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD, terdiri dari 3 (tiga) kegiatan, dengan capaian sebesar 151%.

**2.2. Analisis Kinerja Badan Pendapatan Daerah**

Badan Pendapatan Daerah memiliki obyek pelayanan langsung terhadap masyarakat diantaranya dengan wajib pajak yaitu:

1. Pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
2. Pelaksanaan pendataan terhadap wajib pajak daerah, wajib retribusi dan menetapkan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah;
3. Pembinaan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan pemungutan dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain – lain pendapatan kepada UPT;
4. Penerimaan dan pendistribusian Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunankepada Wajib Pajak;
5. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak, Wajib Retribusi atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) yang melebihi masa jatuh temponya;
6. Pelaksanaan pelayanan keberatan dan banding Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
7. Pelaksanaan pelayanan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
8. Pelaksanaan pelayanan pengajuan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
9. Pelaksanaan pelayanan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan(PBB - P2);
10. Pelaksanaan pelayanan pembatalan ketetapan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB - P2);
11. Pelaksanaan pelayanan pengisian dan penghitungan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
12. Pelaksanaan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
13. Pelaksanaan penelitian verifikasi lapangan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
14. Pelaksanaan pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
15. Pelaksanaan pembetulan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
16. Pelaksanaan pembayaran kembali kelebihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
17. Pelaksanaan penagihan pajak daerah selain PBB-P2 dan retribusidaerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
18. Pelaksanaan pemeriksaan pajak dalam menguji kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan melakukan pengendalian operasional sesuai dengan ketentuan perpajakan daerah;
19. Pelaksanaan laporan realisasi pencairan tunggakan pajak daerah dan retribusi daerah beserta penyetorannya ke Kas Daerah;
20. Koordinasi dan melayani permohonan keberatan dan banding;
21. Pelaksanaan pengendalian operasional dan pengawasan internal terkait dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah juga memiliki peran yang sama dengan Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bidang PBB – P2 tentang pelayanan langsung terhadap Wajib Pajak, yaitu:

1. Menerima Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan dari Bank Persepsi dengan Berita Acara;
2. Menerima Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan terutama dari Wajib Pajak;
3. Menyerahkan Lembar Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk Wajib Pajak yang Pajak Bumi dan Bangunannya telah dibayar kepada Wajib Pajak;
4. Menerima setoran uang hasil penerimaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari petugas Pemungut.

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah tahun 2017-2018 juga dapat diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana disajikan dalam **Tabel 2.2.**Pada tabel 2.2 juga disajikan proyeksi pencapaian kinerja pelayanan untuk tahun 2020 dan 2021.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.2** | | | | | | | | | | | | |
| **Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah** | | | | | | | | | | | | |
| **Kabupaten Malang** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **INDIKATOR** | **SPM / Standar** | **IKK /** | **Target Renstra Perangkat Daerah** | | | | **Realisasi Capaian** | | **Proyeksi** | | **Catatan Analisis** |
| **Nasional** | **IKU** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **7** | **8** |  |  | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| **Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Persentase tingkat kemandirian Keuangan Daerah | - | - | 13.30% | 13.47% | 13.63% | 13.63% | 15.32% | 13,47%\* | 13.63% | 13.63% |  |
| 2 | Persentase penyelesaian ajuan layanan PBB | - | - | 100% | - | - |  | 145.21% | - | - |  |  |
| **Indikator Program - Program Badan Pendapatan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.88% | 100% | 100% | 100% |  |
| 2 | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 3 | Persentase Penunjang Kerja Aparatur | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 4 | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 101% | 100% | 100% | 100% |  |
| 5 | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 7 | Persentase tingkat pelayanan penerimaan BPHTB | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 150.67% | 100% | 100% | 100% |  |
| 8 | Tingkat layanan PBB | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 101.87% | 100% | 100% | 100% |  |
| 9 | Tingkat pengawasan penerimaan daerah | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 10 | Tingkat penerimaan pajak Non PBB dan Non BPHTB | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| **Indikator Kegiatan - Kegiatan Badan Pendapatan Daerah** |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar | - | - | 16000 buah | 16.000 buah | 16.000 buah | 16.000 buah | 16000 buah | 16.000 buah | 16.000 buah | 16.000 buah |  |
| 2 | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet | - | - | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan |  |
| 3 | Jumlah barang cetakan yang disediakan | - | - | 83 jenis | 83 jenis | 83 jenis | 83 jenis | 83 jenis | 83 jenis | 83 jenis | 83 jenis |  |
| 4 | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan | - | - | 7780 HOK | 7780 HOK | 7500 HOK | 7500 HOK | 7780 HOK | 7780 HOK | 7500 HOK | 7500 HOK |  |
| 5 | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan | - | - | 3700 OB | 3700 OB | 3700 OB | 3700 OB | 3700 OB | 3700 OB | 3700 OB | 3700 OB |  |
| 6 | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah | - | - | 790 HOK | 790 HOK | 790 HOK | 790 HOK | 780 HOK | 790 HOK | 790 HOK | 790 HOK |  |
| 7 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan | - | - | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis | 11 jenis |  |
| 8 | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan | - | - | 73 jenis | 73 jenis | 73 jenis | 73 jenis | 58 jenis | 73 jenis | 73 jenis | 73 jenis |  |
| 9 | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah | - | - | 238 HOK | 240 HOK | 240 HOK | 240 HOK | 238 HOK | 240 HOK | 240 HOK | 240 HOK |  |
| 10 | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik | - | - | 67 jenis | 67 jenis | 67 jenis | 30 jenis | 67 jenis | 67 jenis | 67 jenis | 30 jenis |  |
| 11 | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan | - | - | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis | 2 jenis |  |
| 12 | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | - | - | 14 bangunan | 14 bangunan | 14 bangunan | 14 bangunan | 14 bangunan | 14 bangunan | 14 bangunan | 14 bangunan |  |
| 13 | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala | - | - | 173 unit | 173 unit | 173 unit | 173 unit | 173 unit | 173 unit | 173 unit | 173 unit |  |
| 14 | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala | - | - | 47 jenis | 47 jenis | 47 jenis | 47 jenis | 47 jenis | 47 jenis | 47 jenis | 47 jenis |  |
| 15 | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala | - | - | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis |  |
| 16 | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan | - | - | 14 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 14 jenis | 20 jenis | 20 jenis | 20 jenis |  |
| 17 | Jumlah kendaraan Dinas / Operasional Roda 2 baru yang diadakan | - | - | 40 unit | 0 | 2 unit | 0 | 40 unit | 0 | 2 unit | 0 |  |
| 18 | Jumlah kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 baru yang diadakan | - | - | 7 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 7 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit |  |
| 19 | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | - | - | 22 jenis | 15 jenis | 15 jenis | 15 jenis | 22 jenis | 15 jenis | 15 jenis | 15 jenis |  |
| 20 | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga | - | - | 525 stel | 330 stell | 330 stell | 0 stell | 525 stel | 330 stell | 330 stell | 0 stell |  |
| 21 | Jumlah penyediaan pakaian dinas | - | - | 800 stel | 0 | 0 | 0 | 800 stel | 0 | 0 | 0 |  |
| 22 | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan | - | - | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang | 202 orang | 200 orang | 200 orang | 200 orang |  |
| 23 | Jumlah Laporan Tahunan | - | - | 48 dokumen | 48 dokumen | 48 dokumen | 48 dokumen | 48 dokumen | 48 dokumen | 48 dokumen | 48 dokumen |  |
| 24 | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II | - | - | 4 buku | 4 buku | 4 buku | 4 buku | 2 buku | 4 buku | 4 buku | 4 buku |  |
| 25 | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir | - | - | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku | 2 buku |  |
| 26 | Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 176% | 100% | 100% | 100% |  |
| 27 | Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD | - | - | 12 buku | 12 buku | 12 buku | 12 buku | 12 buku | 12 buku | 12 buku | 12 buku |  |
| 28 | Pengajuan Permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB dan BUMD yang terverifikasi dan validasi | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 176% | 100% | 100% | 100% |  |
| 29 | Presentase penerimaan PBB P2 | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 30 | Jumlah penerbitan SPPT PBB P2 yang diterbitkan | - | - | 1376319 OP | 1.376.319 OP | 1.376.319 OP | 1.376.319 OP | 1392226 OP | 1.376.319 OP | 1.376.319 OP | 1.376.319 OP |  |
| 31 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun | - | - | 390 desa | 390 desa | 390 desa | 390 desa | 390 desa | 390 desa | 390 desa | 390 desa |  |
| 32 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB | - | - | 1 aplikasi SIM PBB | 1 aplikasi sim PBB | 1 aplikasi sim PBB | 1 Aplikasi SIM PBB | 1 aplikasi SIM PBB | 1 aplikasi sim PBB | 1 aplikasi sim PBB | 1 Aplikasi SIM PBB |  |
| 33 | Jumlah kegiatan Pekan Panutan Pajak / jumlah sppt PBB P2 yang di distribusikan | - | - | 1376319 OP | 1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP | 1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP | 1 kegiatan pekan panutan pajak/1.376.319 OP | 1515390 OP | 1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP | 1 kegiatan Pekan Panutan Pajak / 1.376.319 OP | 1 kegiatan pekan panutan pajak/1.376.319 OP |  |
| 34 | Juamlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data /Jumlah desa yang dilakukan pemeliharaan Basis Data | - | - | 33 desa | 2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan | 2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan | 33 Desa | 33 desa | 2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan | 2 Desa / 33 Desa di 8 Kecamatan | 33 Desa |  |
| 35 | Jumlah Penagihan Pajak Non PBB yang di tagih | - | - | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak | 10 sektor pajak |  |
| 36 | Jumlah monitoring dan evaluasi pajak daerah yang dilaksanakan | - | - | 19 dokumen | 18 dokumen | 18 dokumen | 18 dokumen | 19 dokumen | 18 dokumen | 18 dokumen | 18 dokumen |  |
| 37 | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan pajak daerah di 7 UPT | - | - | 31 pembinaan | 31 pembinaan | 31 pembinaan | 31 pembinaan | 31 pembinaan | 31 pembinaan | 31 pembinaan | 31 pembinaan |  |
| 38 | Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan | - | - | 30 WP | 25 OP | 25 OP | 30 WP | 30 WP | 25 OP | 25 OP | 30 WP |  |
| 39 | Jumlah operasi gabungan penertiban pajak daerah | - | - | 14 kegiatan | 14 kali | 14 kali | 4 kegiatan | 14 kegiatan | 14 kali | 14 kali | 4 kegiatan |  |
| 40 | Jumlah Pemeriksaaan pajak daerah ke wajib pajak | - | - | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 4 kegiatan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 14 kegiatan | 4 kegiatan |  |
| 41 | Jumlah Kegiatan Pelaksanaan rekonsiliasi piutang pajak di & 7 UPT | - | - | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan | 12 kegiatan |  |
| 42 | Jumlah penghitungan penetapan pernerbitan dan pendistribusianzsurat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta pemeliharaan sistem aplikasi | - | - | 15000 SKPD | 15000 SKPD | 15000 SKPD | 19.000 SKPD | 15000 SKPD | 15000 SKPD | 15000 SKPD | 19.000 SKPD |  |
| 43 | Jumlah Desa yang mendapatan bagi hasil pajak dan Retribusi | - | - | 378 desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 desa | 378 Desa | 378 Desa | 378 Desa |  |
| 44 | Jumlah Laporan Realisasi yang disusun | - | - | 216 laporan | 216 laporan | 216 laporan | 216 Laporan | 216 laporan | 216 laporan | 216 laporan | 216 Laporan |  |
| 45 | Jumlah Permintaan Porforasi dan pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga | - | - | 300 WP | 300 WP | 300 WP | 347 WP | 300 WP | 300 WP | 300 WP | 347 WP |  |
| 46 | Jumlah Objek pajak yang dilakukan insentifikasi dan Ekstensifikasi | - | - | 102 OP | 102 OP | 102 OP | 118 OP | 102 OP | 102 OP | 102 OP | 118 OP |  |
| 47 | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan objek pajak | - | - | 300 WP | 300 WP | 300 WP | 347 WP | 300 WP | 300 WP | 300 WP | 347 WP |  |
| 48 | Jumlah RAPERDA dan RAPERBUB yang di hasilkan | - | - | 3 dokumen | - | - | - | 3 dokumen | - | - | - |  |

* 1. **Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk *database* serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Badan Pendapatan Daerah;
3. Kebijakan teknis bidang Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan UPTD Pendapatan.

Pada awal Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah telah merintis beberapa inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan proses penerimaan Pendapatan Daerah. Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Daerah, selain itu di harapkan bahwa dengan adanya aplikasi dan inovasi ini dapat memudahkan wajib pajak dalam proses pembayaran. Dengan di dukung oleh beberapa Bank Daerah maupun Bank Nasional, Badan Pendapatan Daerah mampu meningkatkan penerimaan Pajak Daerah secara bertahap dan efisien. Namun dalam praktiknya tentunya masih ada beberapa kendala teknis yang di alami dalam pelaksanaan aplikasi Pajak Daerah maupun dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang sebagai berikut:

* 1. Bidang BPHTB dan BUMD
     + - 1. Aplikasi SIM BPHTB sudah dilaksanakan namun pada penerapanya masih memerlukan penyesuaian data base yang handal dan relefan dengan keadaan wajib pajak.
         2. Terdapat perbedaan pemahaman antara petugas pelayanan dan wajib pajak tentang pajak BPHTB, Kurangnya SDM dan sarana-prasarana sehingga berdampak pada kurang optimalnya pelayanan;
         3. SSPD-BPHTB dari Bank Jatim tidak sesuai dengan rekapitulasi yang ada di BAPENDA,pelaksanaan pembayaran di seluruh Cabang Bank Jatim dan lamanya proses pelaporan menyebabkan keterlambatan pelaporan ke BAPENDA;
         4. Terdapat kesenjangan/perbedaan antara nilai pajak yang diajukan oleh wajib pajak dengan realita di lapangan.

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

1. Akan di adakan penyesuaian database yang handal dan tepat dalam aplikasi E-BPHTB oleh pihak ke 3.
2. Memberikan penjelasan kepada wajib pajak, meningkatkan kompetensi petugas pelayanan,meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan,
3. Meningkatkan koordinasi dengan Bank Jatim agar administrasi berkas sesuai rekapitulasi SSPD-BPHTB di BAPENDA dan mengiriman pelaporan yang tepat waktu;
4. Melakukan verifikasi lapangan untuk mendapatkan nilai kewajaran obyek di lapangan.
   1. Bidang PBB
5. Keadaan Wajib Pajak PBB P2 yaitu jumlah Objek Pajak pada waktu pendaerahan PBB P2 tahun 2014 sebanyak 1.348.344, sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.378.158, sehingga ada kenaikan rata-rata per tahun sebanyak 7.453 Objek Pajak. Permasalahannya adalah

kurangnya kesadaran beberapa Wajib Pajak atas pembayaran PBB P2, Nilai NJOP Bumi masih jauh dibawah harga pasar, dan masih ada 104 Desa yang belum mempunyai Basis Data (Sismiop).

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi PBB–P2, meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, meningkatkan pontensi Pendapatan Daerah sektor PBB, dengan mempertimbangkan keadaan objek dan subjek pajak terkini, perlunya dilaksanakan kegiatan Pendataan dan Penilaian yang dilaksanakan melalui:

* 1. Pembentukan basis data objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk membentuk suatu basis data melalui pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan penilaian, serta pengolahan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan bantuan komputer pada suatu wilayah tertentu yang dilakukan oleh Bidang PBB – P2 atau pihak lain yang ditentukan oleh Bidang PBB – P2;
  2. Pemeliharaan basis data objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu suatu kegiatan memperbaharui atau menyesuaikan basis data yang telah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan verifikasi dan penelitian yang dilakukan oleh Bidang PBB – P2 sesuai Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan atau berdasarkan laporan dari wajib pajak yang bersangkutan dalam rangka akurasi data.
  3. Pembentukan dan pemeliharaan basis data objek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *uptodate* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam satu wadah, sehingga pelaksanaanya dapat lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien. Dengan demikian diharapkan akan dapat tercipta pengenaan pajak yang lebih adil dan merata, peningkatan realisasi potensi atau pokok ketetapan, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak. Untuk menjaga akurasi data objek dan subjek pajak yang memenuhi unsur relevan, tepat waktu, andal dan mutakhir maka basis data yang terbentuk perlu dipelihara dengan baik;
  4. Berkurangnya Piutang PBB Hasil Pelimpahan dari Pusat.

Dengan dialihkannya PBB – P2 menjadi pajak daerah maka seluruh piutang PBB-P2 yang tercatat di Ditjen Pajak diserahkan pula kepada Pemerintah Daerah. Dalam penyerahan data piutang PBB-P2 Ditjen Pajak mempunyai tanggung jawab untuk meyerahkan data dan saldo piutang yang seakurat mungkin. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan, PBB-P2 merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan sistem *official assessment*. Pajak ditetapkan oleh fiskus melalui kegiatan pendataan yang dilakukan secara berkala. Saat pemungutan PBB-P2 masih dilakukan oleh Ditjen Pajak, dasar perhitungan pajak terutang yang tercantum dalam SPPT seringkali tidak sesuai dengan keadaan objek terkini. Kesalahan lain yang ditemui adalah nama pemilik atau Wajib Pajak yang tercantum SPPT tidak sesuai dengan nama pemilik atau Wajib Pajak sebenarnya, objek pajak yang tercantum dalam SPPT tidak ditemukan fisiknya, dan penerbitan SPPT ganda atas objek pajak yang sama dengan nama pemilik yang berbeda. Akibat kesalahan-kesalahan tersebut, wajib pajak menjadi enggan.

* 1. Bidang PDRD

1. Kurang maksimalnya SDM yang ada di UPT dalam menggali potensi daerah;
2. Rendahnya kepatuhan Wajib Pajak atau masyarakat mengakibatkan terhambatnya penerimaan pajak, karena pajak dianggap beban oleh sebagian masyarakat;
3. Pengelolaan pajak sudah terselenggara secara online namun belum tersosialisasikan dengan baik ke seluruh masyarakat kabupaten malang, sehingga banyak yang kurang memahami;
4. Inovasi yang dijalankan secara online saat ini adalah SIPANJI, dalam pelaksanaan dilapangan masih sering terkendala dengan pembayaran melalui transfer yang membutuhkan waktu agak lama.
5. Luasnya kondisi geografis Kabupaten Malang sehingga data WP dan OP belum update dari desa-desa, mengingat intensifikasi dan ekstensifikasi pajak adalah sebagian tugas desa, nantinya desa akan menerima 10% dari penerimaan pajak;
6. Keterbatasan jumlah dan lokasi atm dan agen-agen Bank Jatim sebagai bank persepsi pembayaran pajak, sehingga menyulitkan WP membayar melalui bank lain;
7. Potensi pajak belum tergali maksimal, saat ini data potensi pajak sebagian besar merupakan data pajak yang dapat dipungut;
8. Ada tusi yang belum tertuang dalam tusi Bidang PDRD yaitu penyusunan target Pendapatan daerah sector retribusi, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan sehingga perumusan target tidak maksimal. Belum ada subbid yang khusus menangani IT;
9. Kurangnya koordinasi dengan Dinas lain missal DPMPTSP;
10. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) belum tergali secara maksimal karena kewenangan bidang ESDM menjadi kewenangan Provinsi.

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

1. Memaksimalkan SDM UPT dalam menggali potensi pajak daerah dengan cara memberikan bimbingan teknis perpajakan sehingga penerimaan dari sektor pajak lebih meningkat lagi;
2. Memberikan penyuluhan untuk kesadaran wajib pajak;
3. Sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat kabupaten malang tentang sistem pelanyanan pajak daerah secara online;
4. Meningkatkan koordinasi dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur untuk dapat lebih cepat dalam pelayanan setor tunai;
5. Perlunya aplikasi yang dapat menunjang kemudahan penyampaian informasi Desa-desa untuk memberikan informasi Objek Pajak agar dilakukan pendataan
6. Perlunya peningkatan kerjasama dengan Bank Persepsi dan Tempat Pembayaran yang lebih mendekatkan kepada masyarakat seperti Indomaret dan Alfamaret
7. Perlunya menghitung persis jumlah wp dan potensi penerimaan pajak
8. Bidang PDRD melakukan fungsi koordinasi untuk perumusan dan perencanaan target diluar Pajak Daerah
9. Perlunya integrasi sistem dengan Dinas Perijinan antara lain terkait Pajak Reklame
10. Membuat struktur organisasi yang mengakomodasi kebutuhan dalam hal IT
    1. Bidang P3O
11. Luasnya wilayah Kabupaten Malang dengan jumlah wajib pajak yang belum didukung jumlah aparatur pemungut pajak dan tidak adanya ASN Fungsional Juru Sita sebagai bagian dari Penindakan;
12. Banyaknya pergantian domisili wajib pajak serta kepemilikan tempat pengenaan pajak yang berada di luar Kabupaten Malang;
13. Terdapat obyek pajak yang masih belum dilegalitaskan melalui porforasi pajak;
14. Kurang optimalnya konektifitas database Bidang PDRD dengan P3O atau belum adanya sistem aplikasi yang memudahkan monitoring tunggakansehingga data tunggakan tidak *Realtime* / terkini, termasuk data tunggakan pajak yang tercatat pada Unit Pelaksana Teknis;
15. Surat permohonan keringanan dari wajib pajak terlalu berdekatan dengan pelaksanaan kegiatan;

Beberapa langkah-langkah menghadapi permasalahan di atas adalah :

1. Meningkatkankepatuhan pada Wajib Pajak dalam pelunasan pembayaran sehingga perolehan Pajak Daerah pada 9 (sembilan) Obyek Pajak akan meningkat;
2. Terlaksananya penanganan pajak secara intensif di lapangan dan upaya penambahan Wajib Pajak serta Obyek Pajak baru;
3. Melaksanakan pemeriksaan lapangan untuk menentukan Nilai Wajar dalam penentuan besaran keringanan Pajak.
   1. **Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada sub bab ini disajikan perbandingan antara Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dengan analisis kebutuhan Tahun 2020, alasan dan catatan penting perbedaan seperti terlihat pada **tabel 2.3** dibawah ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **Tabel 2.3** | | | | | | | | | | | |
| **Reviu Rancangan Awal Tahun 2020** | | | | | | | | | | | |
| **Badan Pendapatan Dearah Kabupaten Malang** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **RKPD** | | | | | **Hasil Analisis Kebutuhan** | | | | | **Catatan Penting** |
| **PROGRAM/**  **KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR** | **TARGET CAPAIAN** | **Pagu Indikatif** | **PROGRAM/**  **KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR** | **TARGET CAPAIAN** | **Pagu Indikatif** |
| **KINERJA** | **KINERJA** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **I** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase pemenuhan operasional perkantoran (%)** | **100%** | **8,940,677,211.00** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **100%** | **8,940,677,211.00** |  |
| 1 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 12.000 buah | 119,940,000.00 | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 12.000 buah | 119,940,000.00 |  |
| 2 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | 173,160,000.00 | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | 173,160,000.00 |  |
| 3 | 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 4126 OB | 6,709,356,781.00 | 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 4126 OB | 6,709,356,781.00 |  |
| 4 | 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 75 jenis | 400,077,000.00 | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 75 jenis | 400,077,000.00 |  |
| 5 | 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 57 jenis | 325,992,800.00 | 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 57 jenis | 325,992,800.00 |  |
| 6 | 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 51 jenis | 90,246,800.00 | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 51 jenis | 90,246,800.00 |  |
| 7 | 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 jenis | 126,720,000.00 | 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 jenis | 126,720,000.00 |  |
| 8 | 8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 16 jenis | 100,861,000.00 | 9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 16 jenis | 100,861,000.00 |  |
| 9 | 9. Penyediaan Makanan dan Minuman | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 9900 HOK | 210,097,500.00 | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 9900 HOK | 210,097,500.00 |  |
| 10 | 10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 850 HOK | 434,005,330.00 | 11. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 850 HOK | 434,005,330.00 |  |
| 11 | 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 867 HOK | 250,220,000.00 | 12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke dalam Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 867 HOK | 250,220,000.00 |  |
| **II** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)** | **100%** | **1,525,900,000.00** | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%)** | **100%** | **1,525,900,000.00** |  |
| 1 | 12. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | 2 jenis | 253,458,500.00 | 13. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | 2 jenis | 253,458,500.00 |  |
| 2 | 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | 5 jenis | 446,720,694.00 | 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | 5 jenis | 446,720,694.00 |  |
| 3 | 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 173 unit | 404,539,000.00 | 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 173 unit | 404,539,000.00 |  |
| 4 | 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 7 jenis | 55,673,000.00 | 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 7 jenis | 55,673,000.00 |  |
| 5 | 16. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 12 jenis | 27,215,000.00 | 17. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 12 jenis | 27,215,000.00 |  |
| 6 | 17. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 baru yang diadakan (unit) | 2 unit | 78,279,306.00 | 18. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 baru yang diadakan (unit) | 2 unit | 78,279,306.00 |  |
|  |  | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 baru yang diadakan (unit) | 0 unit | 0 |  | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 baru yang diadakan (unit) | 0 unit | 0 |  |
| 7 | 18. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 6 jenis | 260,014,500.00 | 19, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diadakan (jenis) | 6 jenis | 260,014,500.00 |  |
| **III** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** | **100%** | **173,250,000.00** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** | **100%** | **173,250,000.00** |  |
| 1 | 19. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel) | 0 stell | - | 18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel) | 0 stell | - |  |
| 2 | 20. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (stell) | 525 stell | 173,250,000.00 | 21. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (stell) | 525 stell | 173,250,000.00 |  |
| **IV** | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** | **100%** | **56,450,000.00** | **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** | **100%** | **56,450,000.00** |  |
| 1 | 21. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 193 orang | 56,450,000.00 | 19. Pendidikan dan Pelatihan Formal | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 193 orang | 56,450,000.00 |  |
| **V** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase Dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu** | **100%** | **32,350,000.00** | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Presentase Dokumen Perencanaan,Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu** | **100%** | **32,350,000.00** |  |
| 1 | 22. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 70 buku | 16,625,000.00 | 20. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 70 buku | 16,625,000.00 |  |
| 2 | 23. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 3 buku | 11,160,000.00 | 21. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 3 buku | 11,160,000.00 |  |
| 3 | 24. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 4,565,000.00 | 22. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 4,565,000.00 |  |
| **VI** | **Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan BPHTB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** | **100%** | **2,781,250,361.00** | **Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan BPHTB** | Badan Pendapatan Daerah | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** | **100%** | **2,781,250,361.00** |  |
| 1 | 25. Pelayanan dan Penelitian BPHTB | Badan Pendapatan Daerah | jumlah validasi dan penelitian BPHTB | 100% | 1,251,563,361.00 | 23. Pelayanan dan Penelitian BPHTB | Badan Pendapatan Daerah | jumlah validasi dan penelitian BPHTB | 100% | 1,251,563,361.00 |  |
| 2 | 26. Pembukuan BPHTB dab BUMD | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pembukuan BPHTB dan BUMD | 13 buku | 417,187,000.00 | 24. Pembukuan BPHTB dan BUMD | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pembukuan BPHTB dan BUMD | 13 buku | 417,187,000.00 |  |
| 3 | 27. Verifikasi dan Validasi | Badan Pendapatan Daerah | Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan tervalidasi | 100% | 1,112,500,000.00 | 25. Verifikasi dan Validasi | Badan Pendapatan Daerah | Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan tervalidasi | 100% | 1,112,500,000.00 |  |
| **VII** | **Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan PBB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Tingkat Layanan PBB** | **100%** | **6,926,419,016.00** | **Program Pelayanan Peningkatan dan Penerimaan PBB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Tingkat Layanan PBB** | **100%** | **6,926,419,016.00** |  |
| 1 | 28. Optimalisasi penerimaan PBB-P2 | Badan Pendapatan Daerah | Persentase penerimaan PBB - P2 | 100% | 2,431,920,669.00 | 26. Optimalisasi penerimaan PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Persentase penerimaan PBB - P2 | 100% | 2,431,920,669.00 |  |
| 2 | 29. Pencetakan massal dan individual SPPT PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penerbitan SPPT PBB - P2 | 1441746 Objek Pajak | 1,154,838,826.00 | 27. Pencetakan massal dan individual SPPT PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penerbitan SPPT PBB - P2 | 1441746 Objek Pajak | 1,154,838,826.00 |  |
| 3 | 30. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun | 248 Desa | 755,100,693.00 | 28. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun | 248 Desa | 755,100,693.00 |  |
| 4 | 31. Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2 | 1 Aplikasi SIM PBB | 1,085,338,431.00 | 29. Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2 | 1 Aplikasi SIM PBB | 1,085,338,431.00 |  |
| 5 | 32. Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan | 1158380 OP | 421,027,400.00 | 30. Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan | 1158380 OP | 421,027,400.00 |  |
| 6 | 33. Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 67 Desa | 1,078,192,997.00 | 31. Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2 | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 67 Desa | 1,078,192,997.00 |  |
| **VIII** | **Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **3,659,756,314.00** | **Program Peningkatan Pengawasan Penerimaan Daerah** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **3,659,756,314.00** |  |
| 1 | 34. Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih | 14 Sektor Pajak | 922,223,000.00 | 32. Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih | 14 Sektor Pajak | 922,223,000.00 |  |
| 2 | 35. Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penerimaan pajak daerah | 27 kali | 809,881,000.00 | 33. Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil Monitoring dan Evaluasi atas Pajak Daerah | 27 kali | 809,881,000.00 |  |
| 3 | 36. Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat | 0 kali | 0 | 34. Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat | 0 kali | 0 |  |
| 4 | 37. Penanganan Keberatan dan Pengurangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 26 WP | 455,456,314.00 | 35. Penanganan Keberatan dan Pengurangan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 26 WP | 455,456,314.00 |  |
| 5 | 38. Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah operasi gabungan yang dilakukan | 18 Kegiatan | 612,006,000.00 | 36. Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah operasi gabungan yang dilakukan | 18 Kegiatan | 612,006,000.00 |  |
| 6 | 39. Pemeriksaan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 14 Kegiatan | 508,636,000.00 | 37. Pemeriksaan Pajak Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 14 Kegiatan | 508,636,000.00 |  |
| 7 | 40. Rekonsiliasi Piutang Pajak | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT | 11 Kegiatan | 351,554,000.00 | 38. Rekonsiliasi Piutang Pajak | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT | 11 Kegiatan | 351,554,000.00 |  |
| **IX** | **Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **100%** | **3,710,485,980.00** | **Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **100%** | **3,710,485,980.00** |  |
| 1 | 41. Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 15.800 SKPD | 1,399,508,685.00 | 39. Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 15.800 SKPD | 1,399,508,685.00 |  |
| 2 | 42. Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi | 510 Desa | 344,524,000.00 | 40. Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi | 510 Desa | 344,524,000.00 |  |
| 3 | 43. Penyusunan target dan laporan perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah laporan realisasi yang disusun | 295 laporan | 416,039,100.00 | 41. Penyusunan target dan laporan perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah laporan realisasi yang disusun | 295 laporan | 416,039,100.00 |  |
| 4 | 44. Pelayanan dan pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah permintaan perforasi dan pengadministrasian pengelolaan benda - benda berharga | 336 Wajib Pajak | 288,381,947.00 | 42. Pelayanan dan pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah permintaan perforasi dan pengadministrasian pengelolaan benda - benda berharga | 336 Wajib Pajak | 288,381,947.00 |  |
| 5 | 45. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah obyek pajak yang dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi | 99 Obyek Pajak | 648,977,748.00 | 43. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah obyek pajak yang dilakukan Intensifikasi dan Ekstensifikasi | 99 Obyek Pajak | 648,977,748.00 |  |
| 6 | 46. Pendaftaran pendataan dan pemutakhiran data obyek pajak | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 256 Wajib Pajak | 613,054,500.00 | 44. Pendaftaran pendataan dan pemutakhiran data obyek pajak | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 256 Wajib Pajak | 613,054,500.00 |  |
| 7 | 47. Penyusunan regulasi perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang dihasilkan | 0 Dokumen | 0 | 57. Penyusunan regulasi perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang dihasilkan | 0 Dokumen | 0 |  |
|  | **Total** | | | | **27,806,538,882.00** | **Total** | | |  | **27,806,538,882.00** |  |

Dari Tabel 2.3 di atas dapat kita ketahui bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sama dengan program dan kegiatan tahun 2019. Artinya adalah ada kesinambungan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2016-2020. Target yang telah ditetapkan di awal Renstra dibreakdown menjadi target setiap tahun serta selalu dievaluasi capaiannya.

* 1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan**

Pada kegiatan Musrenbang yang telah diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang belum ada usulan ( NIHIL ) program atau kegiatan dari masyarakat yang ditujukan pada Badan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan Badan Pendapatan Daerah tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang bersifat fisik hal ini dapat di lihat dalam tabel Usulan Program dan Kegiatan seperti yang tertera pada **tabel 2.4** dibawah ini:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2.4** | | | | | |
| **Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020** | | | | | |
| **Kabupaten Malang** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **NO** | **PROGRAM / KEGIATAN** | **LOKASI** | **INDIKATOR KINERJA** | **VOLUME** | **CATATAN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **N I H I L** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH**

* 1. **Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam pengelolaan keuangan maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang mengacu kepada kebijakan nasional bagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 yang mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019. Dalam dokumen Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah. Namun permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah potensi dan wilayahKabupaten Malang yang sangat luas namun belum dioptimalkan dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi. Sehingga perlu dilakukan pemetaan potensi pajak daerah secara optimal dan percepatan dalam pengembangan aplikasi pengelolaan pajak daerah. Perlu upaya terus menerus intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, optimaliasi teknologi informasi yang ada serta adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk pengelolaan pajak daerah.

Disamping itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan kelembagaan/ ketatalaksanaan yang belum memadai, belum optimalnya dan terbatasnya personil dalam penggalian sumber sumber pendapatan baru dan pemungut potensi sumber sumber pendapatan dikarenakan kurang sarana kerja dan luasnya wilayah Kabupaten Malang. Untuk mengatasi hal ini diperlukan pembinaan aparatur pemungut pajak melalui bimtek

Arah kebijakan dari Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan,diarahkan kepada:
   * + Perluasan dan peningkatan sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Daerah dan anggaran untuk melaksanakan kebijakan mengenai intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
     + Pengembangan/peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;
     + Peningkatan jangkauan dan jaringan pelayanan dengan pemanfaatan teknologi informasi dengan membangun infrastruktur teknologi dan sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi dan *on line* dengan pihak perbankan
     + Pengembangan sistem dan prosedur tata cara pemungutan secara transparan dan akuntabel.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Tabel 3.1** | | | |  |  |  |
| **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH** | | | | | | | | | |
| **TAHUN 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021** | | | | | | | | | |
| **KABUPATEN MALANG** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **KODE** | **URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)** | **RENCANA TAHUN 2020** | | | | **CATATAN PENTING** | **PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021** | |
| **LOKASI** | **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** | **SUMBER DANA** | **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | | | | **27.806.538.882,00** |  | | | **28.208.630.712,00** |
| **4** | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **27.806.538.882,00** |  | | | **28.208.630.712,00** |
| **4.402** | **KEUANGAN** | | | | **27.806.538.882,00** |  | | | **28.208.630.712,00** |
| **4.402.29** | **BADAN PENDAPATAN DAERAH** | | | | **27.806.538.882,00** |  | | | **28.208.630.712,00** |
| **4.402.29.01** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN** | **Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)** |  | **100%** | **8.940.677.211,00** |  |  | **100%** | **8.940.677.211,00** |
| 4.402.29.01.01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | Badan Pendapatan Daerah | 8500 buah | 119.940.000,00 | APBD Kabupaten |  | 8500 buah | 119.940.000,00 |
| 4.402.29.01.02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | Badan Pendapatan Daerah | 12 bulan | 173.160.000,00 | APBD Kabupaten |  | 12 bulan | 173.160.000,00 |
| 4.402.29.01.03 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 57 jenis | 325.992.800,00 | APBD Kabupaten |  | 57 jenis | 325.992.800,00 |
| 4.402.29.01.04 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Badan Pendapatan Daerah | 12585 HOK | 210.097.500,00 | APBD Kabupaten |  | 12585 HOK | 210.097.500,00 |
| 4.402.29.01.05 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Badan Pendapatan Daerah | 7032 OB | 6.709.356.781,00 | APBD Kabupaten |  | 7032 OB | 6.709.356.781,00 |
| 4.402.29.01.06 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Badan Pendapatan Daerah | 768 HOK | 250.220.000,00 | APBD Kabupaten |  | 768 HOK | 250.220.000,00 |
| 4.402.29.01.07 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 11 jenis | 100.861.000,00 | APBD Kabupaten |  | 11 jenis | 100.861.000,00 |
| 4.402.29.01.08 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 75 jenis | 400.077.000,00 | APBD Kabupaten |  | 75 jenis | 400.077.000,00 |
| 4.402.29.01.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | Badan Pendapatan Daerah | 568 HOK | 434.005.330,00 | APBD Kabupaten |  | 568 HOK | 434.005.330,00 |
| 4.402.29.01.10 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 2 jenis | 126.720.000,00 | APBD Kabupaten |  | 2 jenis | 126.720.000,00 |
| 4.402.29.01.11 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 40 jenis | 90.246.800,00 | APBD Kabupaten |  | 40 jenis | 90.246.800,00 |
| **4.402.29.02** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)** |  | **100%** | **1.525.900.000,00** |  |  | **100%** | **1.927.991.830,00** |
| 4.402.29.02.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 5 jenis | 446.720.694,00 | APBD Kabupaten |  | 4 jenis | 225.000.000,00 |
| 4.402.29.02.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Badan Pendapatan Daerah | 309 unit | 404.539.000,00 | APBD Kabupaten |  | 309 unit | 404.539.000,00 |
| 4.402.29.02.03 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 7 jenis | 55.673.000,00 | APBD Kabupaten |  | 7 jenis | 55.673.000,00 |
| 4.402.29.02.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 12 jenis | 27.215.000,00 | APBD Kabupaten |  | 12 jenis | 27.215.000,00 |
| 4.402.29.02.05 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | Badan Pendapatan Daerah | 7 jenis | 253.458.500,00 | APBD Kabupaten |  | 7 jenis | 253.458.500,00 |
| 4.402.29.02.06 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 2 unit | 78.279.306,00 | APBD Kabupaten | Tahun 2021 pengadaan kendaraan roda 4 | 3 unit | 702.091.830,00 |
| 4.402.29.02.07 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 6 jenis | 260.014.500,00 | APBD Kabupaten |  | 6 jenis | 260.014.500,00 |
| **4.402.29.03** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** |  | **100%** | **173.250.000,00** |  |  | **100%** | **173.250.000,00** |
| 4.402.29.03.02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 350 stel | 173.250.000,00 | APBD Kabupaten |  | 350 stel | 173.250.000,00 |
| **4.402.29.04** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** |  | **100%** | **56.450.000,00** |  |  | **100%** | **56.450.000,00** |
| 4.402.29.04.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang) | Badan Pendapatan Daerah | 100 orang | 56.450.000,00 | APBD Kabupaten |  | 100 orang | 56.450.000,00 |
| **4.402.29.05** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)** |  | **100%** | **32.350.000,00** |  |  | **100%** | **32.350.000,00** |
| 4.402.29.05.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | Badan Pendapatan Daerah | 48 buku | 16.625.000,00 | APBD Kabupaten |  | 48 buku | 16.625.000,00 |
| 4.402.29.05.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Badan Pendapatan Daerah | 4 buku | 11.160.000,00 | APBD Kabupaten |  | 4 buku | 11.160.000,00 |
| 4.402.29.05.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Badan Pendapatan daerah | 1 buku | 4.565.000,00 | APBD Kabupaten |  | 1 buku | 4.565.000,00 |
| **4.402.29.06** | **PROGRAM PELAYANAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD** | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** |  | **100%** | **2.781.250.361,00** |  |  | **100%** | **2.781.250.361,00** |
| 4.402.29.06.01 | Pelayanan dan Penelitian BPHTB | persentase pengajuan permoohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti | Badan Pendapatan Daerah | 100% | 1.251.563.361,00 | APBD Kabupaten |  | 100% | 1.251.563.361,00 |
| 4.402.29.06.02 | Verifikasi dan Validasi | Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terferivikasi dan validasi | Badan Pendapatan Daerah | 100% | 1.112.500.000,00 | APBD Kabupaten |  | 100% | 1.112.500.000,00 |
| 4.402.29.06.03 | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD | Badan Pendapatan Daerah | 27 buku | 417.187.000,00 | APBD Kabupaten |  | 27 buku | 417.187.000,00 |
| **4.402.29.07** | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN** | **Tingkat Layanan PBB** |  | **100%** | **6.926.419.016,00** |  |  | **100%** | **6.926.419.016,00** |
| 4.402.29.07.01 | Optimalisasi Penerimaan PBB P2 | Persentase Penerimaan PBB P2 | Badan Pendapatan Daerah | 100% | 2.431.920.669,00 | APBD Kabupaten |  | 100% | 2.431.920.669,00 |
| 4.402.29.07.02 | Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 | Badan Pendapatan Daerah | 1392226 op | 1.154.838.826,00 | APBD Kabupaten |  | 1392226 op | 1.154.838.826,00 |
| 4.402.29.07.03 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun | Badan Pendapatan Daerah | 390 Desa | 755.100.693,00 | APBD Kabupaten |  | 390 Desa | 755.100.693,00 |
| 4.402.29.07.04 | Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2 | Badan Pendapatan Daerah | 1 aplikasi SIM PBB | 1.085.338.431,00 | APBD Kabupaten |  | 1 aplikasi SIM PBB | 1.085.338.431,00 |
| 4.402.29.07.05 | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB P2 | `- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan | Badan Pendapatan Daerah | 1519390 op | 421.027.400,00 | APBD Kabupaten |  | 1519390 op | 421.027.400,00 |
| 4.402.29.07.06 | Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB P2 | `- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | Badan Pendapatan Daerah | 33 desa | 1.078.192.997,00 | APBD Kabupaten |  | 33 desa | 1.078.192.997,00 |
| **4.402.29.08** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** |  | **100%** | **3.659.756.314,00** |  |  | **100%** | **3.659.756.314,00** |
| 4.402.29.08.01 | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih | Badan Pendapatan Daerah | 10 sektor pajak | 922.223.000,00 | APBD Kabupaten |  | 10 sektor pajak | 922.223.000,00 |
| 4.402.29.08.03 | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | Badan Pendapatan Daerah | 28 WP | 455.456.314,00 | APBD Kabupaten |  | 28 WP | 455.456.314,00 |
| 4.402.29.08.04 | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kegiatan Operasi Gabuangan yang di lakukan | Badan Pendapatan Daerah | 14 kegiatan | 612.006.000,00 | APBD Kabupaten |  | 14 kegiatan | 612.006.000,00 |
| 4.402.29.08.05 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | Badan Pendapatan Daerah | 14 kegiatan | 508.636.000,00 | APBD Kabupaten |  | 14 kegiatan | 508.636.000,00 |
| 4.402.29.08.06 | Rekonsiliasi Piutang Pajak | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT | Badan Pendapatan Daerah | 12 kegiatan | 351.554.000,00 | APBD Kabupaten |  | 12 kegiatan | 351.554.000,00 |
| 4.402.29.08.07 | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah | Badan Pendapatan Daerah | 19 dokumen | 809.881.000,00 | APBD Kabupaten |  | 19 dokumen | 809.881.000,00 |
| **4.402.29.09** | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** |  | **100%** | **3.710.485.980,00** |  |  | **100%** | **3.710.485.980,00** |
| 4.402.29.09.01 | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | Badan Pendapatan Daerah | 15800 SKPD | 1.399.508.685,00 | APBD Kabupaten |  | 15800 SKPD | 1.399.508.685,00 |
| 4.402.29.09.02 | Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | Badan Pendapatan Daerah | 378 desa | 344.524.000,00 | APBD Kabupaten |  | 378 desa | 344.524.000,00 |
| 4.402.29.09.03 | Penyusunan Target dan Laporan Perpajakan | Jumlah Laporan Realisasi yang di susun | Badan Pendapatan Daerah | 216 laporan | 416.039.100,00 | APBD Kabupaten |  | 216 laporan | 416.039.100,00 |
| 4.402.29.09.04 | Pelayanan dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda berharga | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga | Badan Pendapatan Daerah | 336 wajib pajak | 288.381.947,00 | APBD Kabupaten |  | 336 wajib pajak | 288.381.947,00 |
| 4.402.29.09.05 | Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah | jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten | Badan Pendapatan Daerah | 122 OP | 648.977.748,00 | APBD Kabupaten |  | 122 OP | 648.977.748,00 |
| 4.402.29.09.06 | Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | Badan Pendapatan Daerah | 300 WP | 613.054.500,00 | APBD Kabupaten |  | 300 WP | 613.054.500,00 |

* 1. **Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini dapat merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan visi dan misi. **Tujuan** Badan Pendapatan Daerah sesuai Perubahan Renstra tahun 2016-2021 adalah “Meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. **Sasaran** yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan misi, adalah“Peningkatan pendapatan asli daerah guna kemandirian daerah”.

* 1. **Program dan Kegiatan**

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, sesuai analisa kebutuhan untuk tahun 2020 Badan Pendapatan DaerahKabupaten Malang melaksanakan 9 program dan 48 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

* + - * 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 12 kegiatan:
        2. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        3. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
        4. Kegiatan Penyediaan Jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor
        5. Kegiatan Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan;
        6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
        7. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
        8. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
        9. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
        10. Kegiatan Penyediaan ATK
        11. Kegiatan Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah
        12. Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
        13. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang – undangan
        14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari 5 kegiatan :

1. Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
2. Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
3. Kegiatan Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan gedung kantor
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur
5. Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor
   * + - 1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :

Kegiatan Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

* + - * 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 1 kegiatan :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
   * + - 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 3 kegiatan :
2. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
4. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
   * + - 1. Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD terdiri dari 3 kegiatan :
5. Kegiatan Pelayanan dan penelitian BPHTB
6. Kegiatan Pembukuan BPHTB dan BUMD
7. Kegiatan Verifikasi dan Validasi
   * + - 1. Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan terdiri dari 6 kegiatan :
8. Kegiatan Optimalisasi Penerimaan PBB - P2
9. Kegiatan Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2
10. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2
11. Kegiatan Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2
12. Kegiatan Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2
13. Kegiatan Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2
    * + - 1. Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah terdiri dari 6 kegiatan:
14. Kegiatan Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB
15. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah
16. Kegiatan Penanganan Keberatan dan Pengurangan
17. Kegiatan Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah
18. Kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
19. Kegiatan Rekonsiliasi Piutang Pajak
    * + - 1. Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB terdiri dari 6 kegiatan :
20. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan
21. Kegiatan Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa
22. Kegiatan Penyusunan target dan laporan perpajakan
23. Kegiatan Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga
24. Kegiatan Intensifikasi & Ekstenfikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah
25. Kegiatan Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak

Badan Pendapatan Daerah melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota atau Bupati untuk mengintegerasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan Nasional, Provinsi, Kota atau Kabupaten pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegerasikan pengarusutamaan gender dalam prosesperencanaan dan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutmaan Gender dalam Pembangunan di Daerah.

Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit Pemerintah termasuk di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, untuk mengintegerasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pengarusutamaan gender ke dalam dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 termuat dalam Kegiatan Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB-P2 dan Kegiatan Penyusunan Data Penghitungan dan Rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Kepada Desa (GPA terlampir).

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2020 merupakan hasil rangkaian proses perencanaan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan perencanaan baik teknokratik, partisipatif,*top down* dan *bottom-up*. Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah memuat kewenangan urusanpenunjang keuangan. Pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Malang Tahun 2020. Program dan Kegiatan tahun 2020 sesuai Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerahtahun 2016-2021 dan pendanaan indikatif tahun 2020 sebagai berikut :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 4.1** | | | | | | | | | | |
| **Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2020** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kode Rekening** | | | | **Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program / Kegiatan** | **Rencana Tahun 2020** | | | | **Catatan Penting** |
| **Lokasi** | **Target Capaian Kinerja** | **Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif** | **Sumber Dana** |
| **1** | | | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  | **Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **2** |  |  | **Keuangan** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **2** | **1** |  | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **Persentase pemenuhan operasional perkantoran** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **8,940,677,211** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 1 | 1 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi Surat Masuk dan Surat Keluar | SEKRETARIAT | 12.000 buah | 119,940,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & Listrik | Jumlah penyediaan listrik, air minum / air bersih, telekomunikasi & internet | SEKRETARIAT | 12 bulan | 173,160,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 4 | Penyediaan barang Cetakan & Penggandaan | Jumlah barang cetakan yg disediakan | SEKRETARIAT | 57 jenis | 325,992,800 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 5 | Penyediaan Makanan & Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat & tamu yang disediakan | SEKRETARIAT | 9900 (HOK) | 210,097,500 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 6 | Penyediaan Jasa Administrasi keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan | SEKRETARIAT | 4128 (OB) | 6,709,356,781 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 7 | Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke dalam daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah | SEKRETARIAT | 867 (HOK) | 250,220,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 8 | Penyediaan bahan logistik kantor | Jumlah bahan logistik kantor yg disediakan | SEKRETARIAT | 16 jenis | 100,861,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 9 | Penyediaan ATK | Jumlah ATK yg disediakan | SEKRETARIAT | 75 jenis | 400,077,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 10 | Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah | SEKRETARIAT | 850 (HOK) | 434,005,330 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 11 | Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor | Jumlah penyediaan komponen alat - alat listrik & elektronik | SEKRETARIAT | 51 jenis | 90,246,800 | APBD |  |
| 4 | 2 | 1 | 12 | Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan | Jumlah bahan bacaan & peraturan perundang - undangan yg disediakan | SEKRETARIAT | 2 jenis | 126,720,000 | APBD |  |
| **4** | **2** | **2** |  | **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase pemenuhan sarana & prasarana penunjang aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **1,525,900,000** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 2 | 1 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala | SEKRETARIAT | 5 jenis | 446,720,694 | APBD |  |
| 4 | 2 | 2 | 2 | Pemeliharaan rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional | Jumlah kendaraan R4 & kendaraan R2 dinas yg dipelihara rutin & berkala | SEKRETARIAT | 173 unit | 404,539,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 2 | 3 | Pemeliharaan rutin / Berkala Peralatan gedung kantor | Jumlah Peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin / berkala | SEKRETARIAT | 7 jenis | 55,673,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 2 | 4 | Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur | Jumlah mebeleur yg dipelihara rutin / berkala | SEKRETARIAT | 12 jenis | 27,215,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 2 | 5 | Pengadaan peralatan gedung kantor | Jumlah peralatan gedung kantor yg diadakan | SEKRETARIAT | 2 jenis | 253,458,500 | APBD |  |
| 4 | 2 | 2 | 6 | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan dinas/Operasional Roda 2 yang diadakan | SEKRETARIAT | 2 unit | 78,279,306 | APBD |  |
|  |  |  |  |  | Jumlah kendaraan dinas/Operasional Roda 4 yang diadakan | SEKRETARIAT | 0 unit | 0 | APBD |  |
| 4 | 2 | 2 | 7 | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan | SEKRETARIAT | 6 jenis | 260,014,500 | APBD |  |
| **4** | **2** | **3** |  | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase penunjang kerja aparatur** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **173,250,000** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 3 | 1 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya | Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan | SEKRETARIAT | 525 stell | 173,250,000 | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 3 | 2 | Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu | Jumlah Pakaian Olah Raga yang disediakan | SEKRETARIAT | 0 stell | 0 | APBD |  |
| **4** | **2** | **4** |  | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **56,450,000** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 4 | 1 | Pendidikan & Pelatihan Formal | Jumlah SDM yang mendapat pelatihan formal | SEKRETARIAT | 193 orang | 56,450,000 | APBD |  |
| **4** | **2** | **5** |  | **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan** | **Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan & kinerja Perangkat Daerah yg tepat waktu** | **Badan Pendapatan Daerah** | **110 buku** | **32,350,000** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 5 | 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah laporan tahunan | SEKRETARIAT | 70 buku | 16,625,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 5 | 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I & II | SEKRETARIAT | 3 buku | 11,160,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 5 | 3 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah Dokumen Laporan Keuangan akhir | SEKRETARIAT | 1 buku | 4,565,000 | APBD |  |
| **4** | **2** | **6** |  | **Program Pelayanan Penerimaan Pajak BPHTB dan BUMD** | **Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan diteliti** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **2,781,250,361** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 6 | 1 | Pelayanan dan penelitian BPHTB | Presentase pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani | Bidang BPHTB & BUMD | 100% | 1,251,563,361 | APBD |  |
| 4 | 2 | 6 | 2 | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah Pembukuan BPHTB dan BUMD | Bidang BPHTB & BUMD | 13 buku | 417,187,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 6 | 3 | Verifikasi dan Validasi | Pengajuan permohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terverifikasi dan validasi | Bidang BPHTB & BUMD | 100% | 1,112,500,000 | APBD |  |
| **4** | **2** | **7** |  | **Program Pelayanan dan Peningkatan Penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan** | **Tingkat layanan PBB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **1.760 OP** | **6,926,419,016** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 7 | 1 | Optimalisasi Penerimaan PBB - P2 | Persentase penerimaan PBB - P2 | Bidang PBB - P2 | 100% | 2,431,920,669 | APBD |  |
| 4 | 2 | 7 | 2 | Pencetakan Massal dan Individual SPPT PBB - P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB - P2 | Bidang PBB - P2 | 1441746OP | 1,154,838,826 | APBD |  |
| 4 | 2 | 7 | 3 | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB - P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB - P2 dalam 1 tahun | Bidang PBB - P2 | 248 Desa | 755,100,693 | APBD |  |
| 4 | 2 | 7 | 4 | Pengelolaan Data Base Objek dan Subjek PBB P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB - P2 | Bidang PBB - P2 | 1 Aplikasi SIM PBB | 1,085,338,431 | APBD |  |
| 4 | 2 | 7 | 5 | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT PBB - P2 | Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB - P2 yang didistribusikan | Bidang PBB - P2 | 1158380 op | 421,027,400 | APBD |  |
| 4 | 2 | 7 | 6 | Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2 | Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | Bidang PBB - P2 | 67 Desa | 1,078,192,997 | APBD |  |
| **4** | **2** | **8** |  | **Program Pengawasan dan Peningkatan Penerimaan Daerah** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **3,659,756,314** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 8 | 1 | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang ditagih | Bidang P3O | 14 sektor pajak daerah | 922,223,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 8 | 2 | Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah | Jumlah Monitoring Evaluasi Pajak dan Retribusi yang dilaksanakan | Bidang P3O | 27 dokumen | 809,881,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 8 | 3 | Pembinaan Aparatur Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah pembinaan aparatur pengelolaan Pajak di 7 UPT dan konsultasi di Provinsi dan Pusat | Bidang P3O | 0 kali | 0 | APBD |  |
| 4 | 2 | 8 | 4 | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | Bidang P3O | 28 WP | 455,456,314 | APBD |  |
| 4 | 2 | 8 | 5 | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kegiatan operasi gabungan yang dilakukan | Bidang P3O | 18 kegiatan | 612,006,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 8 | 6 | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | Bidang P3O | 14 kegiatan | 508,636,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 8 | 7 | Rekonsiliasi Piutang Pajak | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi piutang dan tunggakan pajak di 7 UPT | Bidang P3O | 11 kegiatan | 351,554,000 | APBD |  |
| **4** | **2** | **9** |  | **Program Pelayanan Peningkatan Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB & BPHTB** | **Badan Pendapatan Daerah** | **100%** | **3,710,485,980** | **APBD** |  |
| 4 | 2 | 9 | 1 | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | Bidang PDRD | 15.800 SKPD | 1,399,508,685 | APBD |  |
| 4 | 2 | 9 | 2 | Penyusunan data penghitungan dan rekonsiliasi Bagi Hasil Pajak Daerah & Retribusi kepada Desa | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | Bidang PDRD | 510 Desa | 344,524,000 | APBD |  |
| 4 | 2 | 9 | 3 | Penyusunan target dan laporan perpajakan | Jumlah Laporan Realisasi yang disusun | Bidang PDRD | 395 laporan | 416,039,100 | APBD |  |
| 4 | 2 | 9 | 4 | Pelayanan dan Pengadministrasian permintaan perforasi benda - benda berharga | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda - Benda Berharga | Bidang PDRD | 336 Wajib Pajak | 288,381,947 | APBD |  |
| 4 | 2 | 9 | 5 | Intensifikasi & Ekstenfikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah | jumlah obyek pajak yang di lakukan intensifikasi dan ekstensifikasi | Bidang PDRD | 99 OP | 648,977,748 | APBD |  |
| 4 | 2 | 9 | 6 | Pendaftaran Pendataan dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | Bidang PDRD | 256 Wajib Pajak | 613,054,500 | APBD |  |
| 4 | 2 | 9 | 7 | Penyusunan Regulasi Perpajakan | Jumlah RAPERDA dan PERBUP yang di hasilkan | Bidang PDRD | 0 dokumen | 0 | APBD |  |
|  |  |  |  | **JUMLAH** |  |  |  | **27,806,538,882** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABEL 4.2** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rencana Kerja, Pendanaan dan target Penyerapan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Anggaran Per Triwulan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| **No** | **URUSAN PMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN** | **INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)** | **RENCANA TAHUN 2010** | | | **Terget kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)** | | | | | | | | | | **KET.** |
| **TARGET CAPAIAN KINERJA** | **KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)** | | **TW I** | | **TW II** | | **TW III** | | | | **TW IV** | |
| **Kinerja (%)** | **Anggaran (%)** | **Kinerja (%)** | **Anggaran (%)** | | **Kinerja (%)** | | **Anggaran (%)** | **Kinerja (%)** | **Anggaran (%)** |  |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | | ***6*** | ***7*** | ***8*** | ***9*** | | ***10*** | | ***11*** | ***12*** | ***13*** | ***14*** |
|  | **FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | **27,806,538,882.00** | **14.34** | **10.74** | **31.42** | **23.45** | **31.88** | | **27.44** | | **22.35** | **38.37** |  |
|  | **KEUANGAN** | | | | **27,806,538,882.00** | **14.34** | **10.74** | **31.42** | **23.45** | **31.88** | | **27.44** | | **22.35** | **38.37** |  |
| **1** | **PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI  PERKANTORAN** | **Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)** | **100%** | | **9,447,796,783.00** | **19.95** | **14.82%** | **19.54** | **24.18%** | **30.32** | | **33.70%** | | **30.19** | **27.30%** |  |
|  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah) | 8500 buah | | 251,550,000.00 | 10.00 | 10.19% | 26.88 | 6.17% | 33.75 | | 42.47% | | 29.38 | 41.17% |  |
|  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | | 302,400,000.00 | 25.00 | 12.23% | 25.00 | 20.26% | 25.00 | | 41.63% | | 25.00 | 25.88% |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 57 jenis | | 355,887,800.00 | 22.97 | 22.19% | 25.41 | 24.55% | 24.49 | | 28.82% | | 27.14 | 24.44% |  |
|  | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 12585 HOK | 223,200,000.00 | | 25.00 | 20.11% | 25.00 | 31.87% | 25.00 | | 30.69% | | 25.00 | 17.33% |  |
|  | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 7032 OB | 6,793,760,400.00 | | 30.12 | 15.87% | 2.41 | 21.33% | 28.92 | | 35.77% | | 38.55 | 27.03% |  |
|  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 768 HOK | 315,577,750.00 | | 22.39 | 16.61% | 32.84 | 43.20% | 44.78 | | 40.20% | | 0.00 | 0.00% |  |
|  | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis) | 11 jenis | 74,960,000.00 | | 25.00 | 10.00% | 25.00 | 20.20% | 25.00 | | 26.53% | | 25.00 | 43.27% |  |
|  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 75 jenis | 400,077,000.00 | | 33.33 | 20.26% | 33.33 | 33.20% | 0.00 | | 22.01% | | 33.33 | 24.53% |  |
|  | Penyediaan Makan Dan Minum | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK) | 568 HOK | 483,417,000.00 | | 11.35 | 13.83% | 10.45 | 12.73% | 38.92 | | 47.42% | | 39.28 | 26.02% |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 2 jenis | 126,720,000.00 | | - | 10.00% | 0.00 | 25.40% | 41.60 | | 27.01% | | 58.40 | 37.59% |  |
|  | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 40 jenis | 120,246,833.00 | | 14.30 | 11.77% | 8.61 | 27.05% | 46.08 | | 28.12% | | 31.01 | 33.06% |  |
| **2** | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR** | **Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)** | **100%** | **1,021,785,956.00** | | **4.71** | **2.43%** | **33.52** | **37.73%** | **21.63** | | **31.33%** | | **40.13** | **28.51%** |  |
|  | Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala ( jenis) | 5 jenis | 211,083,759.00 | | - | 0.00% | 14.89 | 65.16% | 0.00 | | 10.05% | | 85.11 | 24.79% |  |
|  | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 309 unit | 450,722,197.00 | | - | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 45.45 | | 44.25% | | 54.55 | 55.75% |  |
|  | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 7 jenis | 91,000,000.00 | | - | 0.00% | 21.43 | 30.82% | 21.43 | | 48.85% | | 57.14 | 20.32% |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor | Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 12 jenis | 49,980,000.00 | | 21.43 | 11.80% | 50.00 | 28.91% | 21.43 | | 26.68% | | 7.14 | 32.61% |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan ( jenis) | 7 jenis | 31,400,000.00 | | 11.56 | 5.18% | 28.32 | 19.20% | 23.12 | | 49.49% | | 36.99 | 26.13% |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor | Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit) | 2 unit | 78,600,000.00 | | - | 0.00% | 100.00 | 100.00% | 0.00 | | 0.00% | | 0.00 | 0.00% |  |
|  | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan( jenis) | 6 jenis | 109,000,000.00 | | - | 0.00% | 20.00 | 20.00% | 40.00 | | 40.00% | | 40.00 | 40.00% |  |
| **3** | **PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR** | **Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)** | **100%** | **124,827,472.00** | | **-** | **0%** | **100** | **0.00%** | **0%** | | **100.00%** | | **0%** | **0.00%** |  |
|  | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 350 stel | 124,827,472.00 | | - | 0% | 100 | 0.00% | 0 | | 100.00% | | 0.00% | 0.00% |  |
|  | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 350 stel | - | |  | - |  | - |  | | - | |  | - |  |
| **4** | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR** | **Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)** | **100%** | **58,136,000.00** | | **0%** | **0%** | **0%** | **0.00%** | **0** | | **100.00%** | | **0%** | **0.00%** |  |
|  | Pendidikan Dan Pelatian Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan ( orang) | 100 orang | 58,136,000.00 | | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0 | | 100.00% | | 0.00% | 0.00% |  |
| **5** | **PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN** | **Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)** | **100%** | **76,081,000.00** | | **0** | **0.00%** | **33.33** | **26.61%** | **25.00** | | **48.12%** | | **41.67** | **25.27%** |  |
|  | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Tahunan (Buku) | 48 buku | 23,976,000.00 | | - | 0.00% | 50 | 25.00% | 25 | | 60.59% | | 25 | 14.41% |  |
|  | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 4 buku | 22,020,000.00 | | - | 0.00% | 50 | 54.84% | 50 | | 34.41% | | 0 | 10.75% |  |
|  | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 1 buku | 30,085,000.00 | | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | | 49.35% | | 100 | 50.65% |  |
| **6** | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK BPHTB DAN BUMD** | **Persentase Tingkat pelayanan penerimaan BPHTB** | **100%** | **2,781,250,361.00** | | **25.00** | **10.89%** | **25.00** | **18.32%** | **25.00** | | **18.52%** | | **25.00** | **52.27%** |  |
|  | Pelayanan Dan Penelitian BPHTB | persentase pengajuan permoohonan Wajib Pajak untuk pembayaran BPHTB yang terlayani dan di teliti | 100% | 1,067,654,911.00 | | 25.00 | 11.03% | 25.00 | 24.09% | 25.00 | | 19.84% | | 25.00 | 45.04% |  |
|  | Verifikasi dan Validasi | Persentase jumlah pengajuan permohonan wajib pajak untuk pembayaran BPHTB yang terferivikasi dan validasi | 100% | 1,206,671,200.00 | | 25.00 | 10.48% | 25.00 | 17.52% | 25.00 | | 15.01% | | 25.00 | 56.99% |  |
|  | Pembukuan BPHTB dan BUMD | Jumlah laporan pembukuan BPHTB dan BUMD | 27 buku | 506,924,250.00 | | 25.00 | 11.17% | 25.00 | 13.35% | 25.00 | | 20.70% | | 25.00 | 54.78% |  |
| **7** | **PROGRAM PELAYANAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN PBB PERDESAAN DAN PERKOTAAN** | **Tingkat Layanan PBB** | **100%** | **6,926,419,016.00** | | **36.08** | **8.89%** | **17.25** | **21.90%** | **30.00** | | **26.49%** | | **16.67** | **42.71%** |  |
|  | Optimalisasi Penerimaan PBB - P2 | Persentase Penerimaan PBB P2 | 100% | 2,431,920,669.00 | | 6.50 | 7.98% | 13.50 | 45.73% | 60.00 | | 13.33% | | 20.00 | 32.96% |  |
|  | Pencetakan Massal Dan Individual SPPT PBB - P2 | Jumlah Penerbitan SPPT PBB P2 | 1392226 op | 1,154,838,826.00 | | 85.00 | 20.49% | 5.00 | 42.80% | 5.00 | | 19.77% | | 5.00 | 16.94% |  |
|  | Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Perkembangan Penerimaan PBB - P2 | Jumlah Desa/Kelurahan di 33 Kecamatan yang dilakukan kegiatan Monitoring dan evaluasi perkembangan penerimaan PBB P2 Jumlah laporan penerimaan mingguan PBB P2 dalam 1 tahun | 390 Desa | 755,100,693.00 | | 10.00 | 2.88% | 30.00 | 5.81% | 50.00 | | 22.93% | | 10.00 | 68.38% |  |
|  | Pengelolaan Data Base Objek Dan Subjek PBB - P2 | Jumlah Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB P2 | 1 aplikasi SIM PBB | 1,085,338,431.00 | | - | 0.00% | 20.00 | 9.76% | 40.00 | | 47.20% | | 40.00 | 43.04% |  |
|  | Pekan Panutan Dan Pendistribusian SPPT  PBB - P2 | `- Jumlah Kegiatan Pekan Panutan - Jumlah SPPT PBB P2 yang didistribusikan | 1519390 op | 421,027,400.00 | | 90.00 | 20.07% | 10.00 | 25.67% | - | | 42.78% | | - | 11.47% |  |
|  | Pembentukan Dan Pemeliharaan Basis Data PBB - P2 | `- Jumlah Desa yang dilakukan pembentukan basis data - Jumlah Desa yang dilakukan pemeliharaan Basis data | 33 desa | 1,078,192,997.00 | | 25.00 | 1.92% | 25.00 | 1.66% | 25.00 | | 12.95% | | 25.00 | 83.47% |  |
| **8** | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH** | **Tingkat Pengawasan Penerimaan Daerah** | **100%** | **3,659,756,314.00** | | **21.67** | **9.84%** | **28.33** | **23.07%** | **26.67** | | **24.66%** | | **23.33** | **42.43%** |  |
|  | Penagihan Piutang Pajak Daerah Non PBB | Jumlah Penagihan Pajak Daerah (Non PBB) yang di tagih | 10 sektor pajak | 922,223,000.00 | | 25.00 | 10.41% | 25.00 | 23.01% | 25.00 | | 34.12% | | 25.00 | 32.46% |  |
|  | Monitoring Dan Evaluasi Pajak Daerah | jumlah penanganan keberatan dan pengurangan objek pajak | 28 WP | 455,456,314.00 | | 25.00 | 8.27% | 25.00 | 20.12% | 25.00 | | 38.98% | | 25.00 | 32.62% |  |
|  | Pemeriksaan Pajak Daerah | Jumlah kegiatan Operasi Gabuangan yang di lakukan | 14 kegiatan | 612,006,000.00 | | 25.00 | 3.05% | 25.00 | 28.04% | 25.00 | | 11.16% | | 25.00 | 57.75% |  |
|  | Penanganan Keberatan dan Pengurangan | Jumlah pemeriksaan Pajak Daerah ke Wajib Pajak | 14 kegiatan | 508,636,000.00 | | 25.00 | 13.07% | 25.00 | 19.74% | 25.00 | | 22.47% | | 25.00 | 44.73% |  |
|  | Operasi Gabungan Penertiban Pajak Daerah | Jumlah kegiatan pelaksanaan rekonsiliasi Piutang dan Tunggakan Pajak di 7 UPT | 12 kegiatan | 351,554,000.00 | | 15.00 | 11.54% | 35.00 | 24.55% | 30.00 | | 22.80% | | 20.00 | 41.11% |  |
|  | Rekonsialisasi Piutang Pajak | Jumlah dokumen laporan hasil monitoring & evaluasi atas penerimaan pajak daerah | 19 dokumen | 809,881,000.00 | | 15.00 | 12.67% | 35.00 | 22.97% | 30.00 | | 18.45% | | 20.00 | 45.91% |  |
| **9** | **PROGRAM PELAYANAN PENINGKATAN DAN  PENERIMAAN PAJAK NON PBB DAN BPHTB** | **Tingkat Penerimaan Pajak Non PBB dan BPHTB** | **100%** | **3,710,485,980.00** | | **21.67** | **7.61%** | **25.83** | **25.49%** | **28.33** | | **19.10%** | | **24.17** | **47.81%** |  |
|  | Penyediaan Jasa Administrasi Perpajakan | Jumlah Penghitungan Penetapan Penerbitan dan Pendistribusian Surat Ketetapan Pajak (SKP/SKPD) serta Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perpajakan | 15800 SKPD | 1,399,508,685.00 | | 20.00 | 5.67% | 25.00 | 18.32% | 30.00 | | 23.18% | | 25.00 | 52.84% |  |
|  | Pendaftaran Pendataan Dan Pemutakhiran Data Obyek Pajak | Jumlah desa yang mendapatkan bagi hasil Pajak dan Retribusi | 378 desa | 344,524,000.00 | | 10.00 | 8.04% | 30.00 | 23.86% | 40.00 | | 21.30% | | 20.00 | 46.81% |  |
|  | Penyusunan Data Penghitungan Dan Rekonsialisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Kepada Desa | Jumlah Laporan Realisasi yang di susun | 216 laporan | 416,039,100.00 | | 25.00 | 8.86% | 25.00 | 55.70% | 25.00 | | 13.25% | | 25.00 | 22.18% |  |
|  | Penyusunan Target Dan Laporan Perpajakan | Jumlah permintaan Perforasi dan Pengadministrasian pengelolaan Benda Benda Berharga | 336 wajib pajak | 288,381,947.00 | | 25.00 | 9.65% | 25.00 | 19.61% | 25.00 | | 19.62% | | 25.00 | 51.12% |  |
|  | Pelayanan Dan Pengadministrasian Permintaan Porforasi Benda - Benda Berharga | jumlah obyek pajak yang di lakukan inten dan eksten | 122 OP | 648,977,748.00 | | 25.00 | 11.11% | 25.00 | 29.86% | 25.00 | | 25.86% | | 25.00 | 33.17% |  |
|  | Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber Sumber Pendapatan Daerah | Jumlah Wajib pajak yang terdaftar dan jumlah pendataan obyek pajak | 300 WP | 613,054,500.00 | | 25.00 | 2.32% | 25.00 | 5.56% | 25.00 | | 11.40% | | 25.00 | 80.72% |  |
|  | **Jumlah** |  |  | **27,806,538,882.00** | | **14.34** | **10.74** | **31.42** | **23.45** | **31.88** | | **27.44** | | **22.35** | **38.37** |  |

**BAB V**

**PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 berfungsi sebagai pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan khususnya pelayanan publik Tahun 2020, serta mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Malang agar dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja ini sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Selanjutnya, Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 yang telah disusun ini akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan maka kegiatan atau pekerjaan tersebut akan dianggarkan kembali pada Tahun 2021.

Implementasi Rencana Kerja sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malang yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

Demikian untuk dilaksanakan.

**Plt. BUPATI MALANG,**

**SANUSI**